

3. HUKUM DAN PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi Lain Urusan Hukum dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.

a. Alokasi Program Dan Kegiatan

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 telah mengalokasikan anggaran APBD untuk pencapaian Hukum dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan sebesar **Rp 734.150.000,-** atau sebesar **0,0367%** dari total APBD Tahun 2017 sebesar Rp 2.000.613.704.761,-. Alokasi anggaran Fungsi Lain Hukum dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan dapat direalisasikan sebesar **Rp 704.429.701,-** atau sebesar **95,952%** sebagaimana ditunjukkan pada tabel di berikut ini.

Tabel III.F.3.1
Program dan Realisasi Anggaran Fungsi Lain Hukum dan
Penataan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2017

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
A	Belanja Langsung	734.150.000	704.429.701
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	149.050.000	146.977.901
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	35.100.000	33.684.144
3	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	550.000.000	523.767.656
B	Belanja Tidak langsung	-	
1	Belanja Pegawai	-	
2	Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	-	
3	Belanja Tak Terduga	-	
	Jumlah total	734.150.000	704.429.701

b. Program Dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Untuk mendukung program ini, kegiatan yang dilaksanakan antara lain : Penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan jasa administrasi keuangan, Penyediaan alat tulis kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Penyediaan makanan dan minuman, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang menunjang program ini meliputi kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor.

3) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Untuk mewujudkan sistem hukum daerah yang adil, konsekuen dan tidak diskriminatif serta tidak bias gender, maka dilakukan penataan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2017 telah ditetapkan sebanyak 15 (lima belas) perda, 3 (tiga) diantaranya adalah Perda APBD. Dari seluruh Raperda yang ditetapkan menjadi peraturan daerah, tidak satupun yang dibatalkan oleh pemerintah, baik karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi maupun dengan kepentingan umum. Hal tersebut karena dalam proses penyusunannya sudah melalui konsultasi publik, baik yang dilakukan oleh DPRD maupun oleh Pemerintah Daerah. Disamping itu dalam proses pembahasan raperda telah melalui beberapa mekanisme dan tahapan yang harus dilaksanakan, dimana untuk raperda APBD melalui evaluasi gubernur. Raperda pajak dan retribusi evaluasi sampai ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri sedangkan raperda yang lain harus mendapatkan fasilitasi dari gubernur, sehingga peraturan daerah yang ditetapkan dapat memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dan pada tahun 2017 tidak ada perda yang dibatalkan oleh pemerintah.

Kegiatan yang mendukung program ini antara lain : **Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan**, kegiatan ini berupa sosialisasi perda nomor 3 tahun 2017 tentang penyelenggaraan usaha hiburan di Kabupaten Wonosobo, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2017 bertempat di ruang rapat Mangunkusumo dengan narasumber dari Dinas pariwisata dan kebudayaan. DPMPPT dan kantor Satpol PP dengan peserta 280 orang dari unsur camat dan kepala desa/kepala kelurahan se kabupaten wonosobo. **Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah**, kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi program pembentukan perda tahun 2017 yang telah ditetapkan pada tahun 2016, propemperda telah ditetapkan mencakup 26 raperda terdiri dari 7 raperda inisiatif DPRD, 13 raperda inisiatif Pemda dan 6 raperda masuk daftar kumulatif terbuka, dari 26 Raperda dapat dibahas 23 raperda dengan hasil, dapat ditetapkan 15 raperda, 3 raperda tentang APBD dan 12 perda lainnya, sedangkan 2 raperda tentang pajak dan retribusi daerah masih dalam proses evaluasi kemendagri dan 6 raperda sudah dibahas tapi belum dapat ditetapkan dikarenakan pembahasan dan penetapan raperda mengikuti agenda sidang yang ditetapkan oleh DPRD. Kegiatan ini juga untuk memfasilitasi penyusunan program pembentukan perda tahun 2018, propemperda tahun 2018 ditetapkan sejumlah 20 raperda dengan rincian 5 raperda inisiatif DPRD dan 15 raperda usulan Pemkab, disamping 20 raperda yang masuk propemperda tahun 2018 juga terdapat daftar kumulatif terbuka meliputi raperda tentang APBD dan raperda lain yang masuk daftar kumulatif terbuka. Pada tahun 2017 kabupaten Wonosobo mendapat penghargaan sebagai kabupaten peduli HAM dan ditunjuk sebagai salah satu dari 8 kabupaten/kota se-Indonesia sebagai peserta pameran HAM bersamaan dengan penganugerahan penghargaan pada tanggal 10 Desember 2017 di Surakarta.

c. Capaian Kinerja

Tabel III.F.3.2
Capaian Kinerja Fungsi Lain
Urusan Hukum Dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Berdasarkan Indikator RKPD 2017

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target RPJMD 2016-2021	Target 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Rasio realisasi Propemperda	10/25	0,28	0,6	214,3	→
2	Persentase Raperda yang disetujui DPRD	100%	100%	100%	100	○
3	Rasio Perda yang dibatalkan terhadap raperda dan raperbup yang ditetapkan menjadi Perda dan Perbup	0,1	0,1	0	0	○

Keterangan Status Capaian:

- | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ○ | Tercapai | Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$ |
| → | Tidak tercapai | Realisasi capaian 90% - 99% |
| ↓ | Tidak tercapai dan perlu upaya keras | Realisasi capaian $\leq 90\%$ |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase Rasio realisasi Propemperda pada tahun 2017 mencapai 214,3% hal ini berarti realisasi capaian tahun 2017 lebih dari dua kali lipat target capaian dan realisasi capaian Perda yg ditetapkan pada tahun 2017 mencapai 100% atau secara keseluruhan disetujui oleh DPRD. Persentase Realisasi Rasio Perda yang dibatalkan terhadap raperda dan raperbup yang ditetapkan menjadi Perda dan Perbup pada tahun 2017 adalah 0% hal ini menunjukkan bahwa target tahun 2017 telah tercapai. Secara rinci peraturan daerah yang diterbitkan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel III.F.3.3. Peraturan Daerah yang dihasilkan Tahun 2017

NO	NO PERDA	TENTANG	TGL PENETAPAN	TGL PENGUNDANGAN
1.	1 Tahun 2017	Ruang Terbuka Hijau	10 April 2017	11 April 2017
2.	2 Tahun 2017	Penyelenggaraan Keolahragaan	10 April 2017	11 April 2017
3.	3 Tahun 2017	Penyelenggaraan Usaha Hiburan	10 April 2017	11 April 2017
4.	4 Tahun	Pengelolaan Barang Milik Daerah	10 April 2017	11 April 2017

III.F.3.Fungsi Lain Hukum dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan

NO	NO PERDA	TENTANG	TGL PENETAPAN	TGL PENGUNDA NGAN
	2017			
5.	5 Tahun 2017	Penyelenggaraan Kearsipan	10 April 2017	11 April 2017
6.	6 Tahun 2017	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2016	21 Agustus 2017	22 Agustus 2017
7.	7 Tahun 2017	Penyelenggaraan Perpustakaan	21 Agustus 2017	22 Agustus 2017
8.	8 Tahun 2017	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032	21 Agustus 2017	22 Agustus 2017
9.	9 Tahun 2017	Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo	21 Agustus 2017	22 Agustus 2017
10.	10 Tahun 2017	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Penyebutan Peristilahan dan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo	21 Agustus 2017	22 Agustus 2017
11.	11 Tahun 2017	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil	21 Agustus 2017	22 Agustus 2017
12.	12 Tahun 2017	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Ketentuan Usaha Pertambangan Bahan Galian gol C	21 Agustus 2017	22 Agustus 2017
13.	13 Tahun 2017	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah	19 September 2017	20 September 2017
14.	14 Tahun 2017	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2017	30 Oktober 2017	30 Oktober 2017
15	15 Tahun 2017	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018	29 Desember 2017	29 Desember 2017

Sumber: Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo, 2017

d. Permasalahan Dan Solusi

Dalam melaksanakan Fungsi lain Urusan Hukum dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan, beberapa permasalahan yang dihadapi dan solusi yang perlu diupayakan untuk mengurai permasalahan sebagai berikut :

Tabel III.F.3.4
Matriks Permasalahan dan Solusi pada
Fungsi Lain Urusan Hukum dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan

No	Masalah	Solusi
1	Masih terdapat peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat yang tidak saling mendukung antar kementerian/lembaga sehingga pelaksanaan di daerah menjadi tidak jelas.	Melakukan penyesuaian terhadap aturan-aturan yang baru walaupun aturan-aturan yang lama belum sepenuhnya dilaksanakan.
2	Masih terdapat ketentuan dalam perundang-undangan dirasakan kurang peka atau bahkan bertentangan dengan realitas kondisi di daerah sehingga sering mengalami berbagai kendala dalam penerapannya.	Melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan pusat yang baru meskipun penerapannya mengalami kesulitan.